



Pengintegrasian PRB ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Multazam Fetri Ardi, DRR Indonesia

Diseminasi Pengintegrasian Pengarusutamaan PRB kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

17-19 November 2021

Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan

*Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, Pasal 10*

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah melalui **koordinasi, integrasi dan sinkronisasi**

Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan



Pengintegrasian

Strategi untuk menjamin penyelenggaraan pengurangan risiko bencana yang ada dalam dokumen RPB ke perencanaan pembangunan



Pengarusutamaan

Strategi untuk menjamin penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dalam berbagai kegiatan pembangunan yang diselenggarakan OPD dan tidak termasuk dalam dokumen RPB

Pemaduan **Penanggulangan Bencana** ke dalam **Perencanaan Pembangunan**

- KARAKTERISTIK -

❑ **PEMADUAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERHADAP RISIKO BARU YANG DITIMBULKAN OLEH PROGRAM PEMBANGUNAN**

pendekatan pengurangan risiko bencana perlu dilakukan untuk mengantisipasi maupun menanggulangi risiko baru yang diakibatkan oleh program pembangunan tersebut.

❑ **PEMADUAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERHADAP RISIKO YANG TELAH ADA**

pendekatan utama dari pemaduan model ini adalah dengan meniupkan semangat dan prinsip pengurangan risiko bencana pada kegiatan-kegiatan di institusi/organisasi pemangku kepentingan tersebut, sekalipun kegiatannya tidak berhubungan langsung dengan pengurangan risiko bencana itu sendiri.

Pemaduan Rencana Pembangunan dalam Perspektif Pengurangan Risiko Bencana

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

3

Koordinatif

Rencana kerja pemerintah daerah yang tidak berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana namun menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat kepada BPBD untuk mengkoordinasikan pekerjaan sejenis sesuai dengan standar

Pengintegrasian

Pengarusutamaan

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

SASARAN

- ❑ Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, untuk mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai
- ❑ Menjamin program kegiatan RPB masuk dalam APBD, melalui RPJMD dan RKPD

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain



Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

Penyusunan Rencana Kontingensi

Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyelenggaraan Peringatan Dini

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD



Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

Penyusunan Rencana Kontingensi

Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyelenggaraan Peringatan Dini

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana



Penyusunan Rencana Kontingensi

Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyelenggaraan Peringatan Dini

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

Penyusunan Rencana Kontingensi



Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyelenggaraan Peringatan Dini

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

Penyusunan Rencana Kontingensi

Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana



Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyelenggaraan Peringatan Dini

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

Penyusunan Rencana Kontingensi

Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana



Penyelenggaraan Peringatan Dini

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama ke-pada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

2



Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

Penyiapan lokasi evakuasi

Pengembangan budaya sadar bencana

Persyaratan analisis risiko bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama ke-pada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD



Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

Penyiapan lokasi evakuasi

Pengembangan budaya sadar bencana

Persyaratan analisis risiko bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama ke-pada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern



Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

Penyiapan lokasi evakuasi

Pengembangan budaya sadar bencana

Persyaratan analisis risiko bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama ke-pada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini



Penyiapan lokasi evakuasi

Pengembangan budaya sadar bencana

Persyaratan analisis risiko bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

Penyelenggara Kolaboratif

2

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama ke-pada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

Penyiapan lokasi evakuasi



Pengembangan budaya sadar bencana

Persyaratan analisis risiko bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

Penyelenggara Kolaboratif

2

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama ke-pada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

Penyiapan lokasi evakuasi

Pengembangan budaya sadar bencana



Persyaratan analisis risiko bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pengintegrasian

Penyelenggara Teknis

1

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan OPD lain

Penyelenggara Kolaboratif

2

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama ke-pada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini

Penyiapan lokasi evakuasi

Pengembangan budaya sadar bencana

Persyaratan analisis risiko bencana



Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Pintu Masuk Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan ber-kolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Perangkat

Kajian Risiko Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana

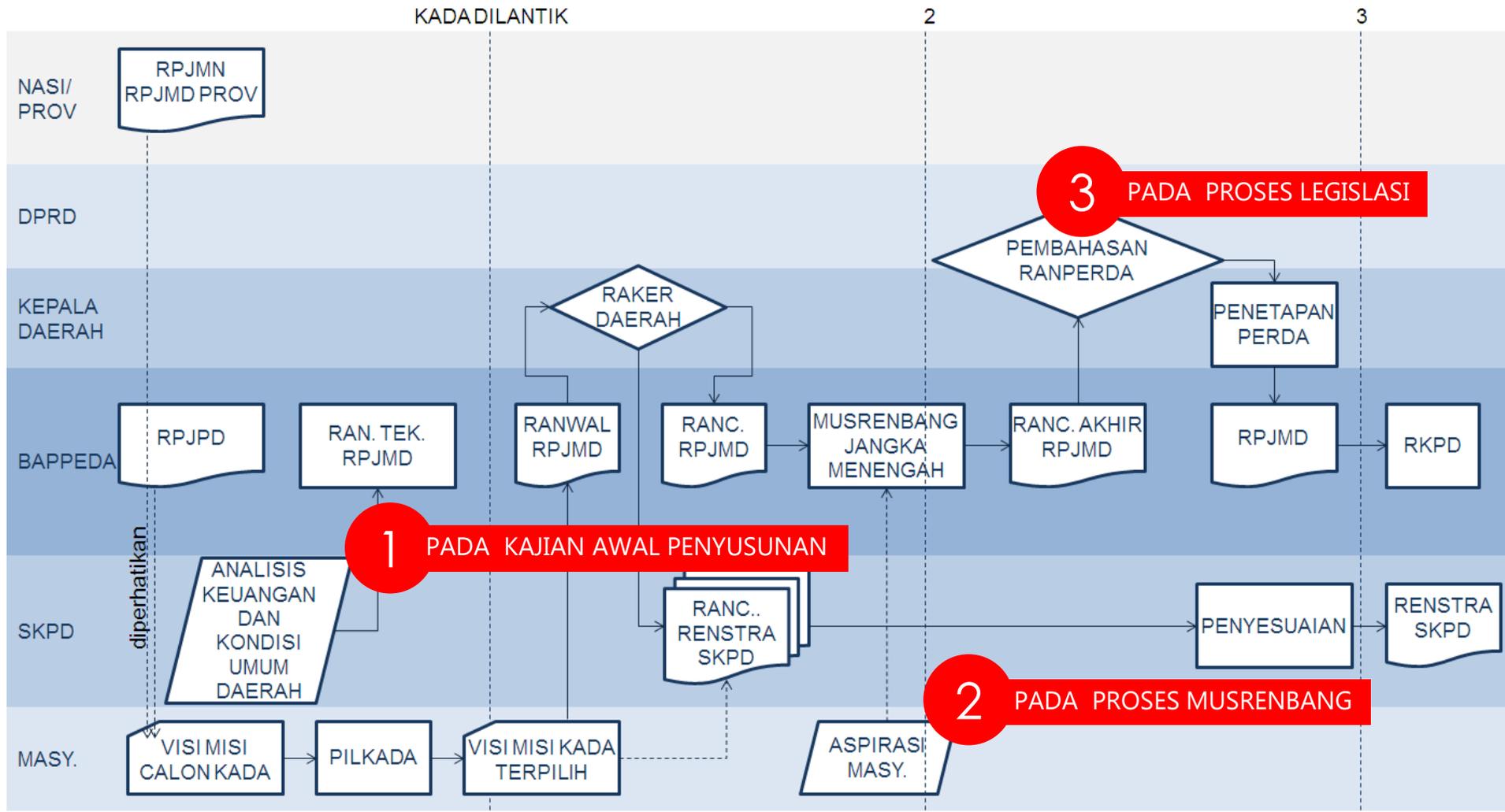
Pemetaan Aktor Kunci

Pintu Masuk

Pintu Masuk Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada Proses Perencanaan Pembangunan

Pintu Masuk Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada Proses Penganggaran Pembangunan

Pintu Masuk Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada Proses Perencanaan Pembangunan



1

Pada Kajian Awal Penyusunan

FASE	PERANGKAT PENDUKUNG	SASARAN	PENANGUNG JAWAB
Analisis Awal Kondisi Daerah	Kajian Risiko Bencana	Analisis keuangan dan kondisi daerah yang memperhatikan risiko bencana	BAPPEDA, BPBD, Praktisi Kebencanaan Daerah
	Rencana Penanggulangan Bencana	Integrasi isu strategis pada RPB ke dalam analisis awal kondisi daerah	BAPPEDA, BPBD
Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Daerah	Rencana Penanggulangan Bencana	Integrasi pelaksanaan RPB di level teknokratis (Bappeda) dan level teknis (SKPD) secara berkesinambungan.	BAPPEDA, BPBD
		Integrasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPB sebelumnya	

2

Pada Proses Musrenbang

FASE	AKTOR KUNCI	TARGET KELUARAN	PENDEKATAN
Musrenbang Desa/ Kelurahan	Kepala Desa dan Forum PRB desa/ kelurahan	Usulan kegiatan desa/kelurahan yang sensitif PRB	<ul style="list-style-type: none">• Melibatkan tim siaga bencana desa/ kelurahan• Memastikan usulan kegiatan telah sesuai dengan jenis risiko yang ada di desa/ kelurahan
Musrenbang Kecamatan	Forum PRB tingkat kecamatan, BPBD dan BAPPEDA	Usulan kegiatan di tingkat kecamatan	Memastikan usulan kecamatan ke Kabupaten berdasarkan kajian risiko yang ada di wilayah tersebut
Forum SKPD	BAPPEDA, BPBD, Forum PRB, Delegasi Kecamatan	Perencanaan di tingkat SKPD	Memastikan forum SKPD melakukan pembahasan dengan mendasarkan pada kajian risiko yang dimiliki oleh provinsi/ Kabupaten/kota
Musrenbang Daerah	Bappeda, BPBD, Forum PRB	Masukan terhadap dokumen perencanaan	Memastikan program PB telah terakomodir

3

Pada Proses Legislasi

FASE	PERANGKAT PENDUKUNG	TARGET KELUARAN	AKTOR KUNCI
Pembahasan dan Penetapan Rencana Pembangunan Daerah	Ringkasan Kajian Risiko Bencana Ringkasan Rencana Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi isu penanggulangan bencana pada batang tubuh dokumen perencanaan pembangunan daerah• Integrasi program kegiatan RPB pada matriks program-kegiatan dokumen perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA, BPBD, Komisi DPRD Mitra BPBD

Pintu Masuk Pengintegrasian

1

Penyelenggara Teknis

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah BPBD sebagai pelaksana dan ber-kolaborasi dengan OPD lain

2

Penyelenggara Kolaboratif

Rencana kerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan aspek pengurangan risiko bencana dan menjadi ranah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memberikan mandat bersama kepada BPBD dan OPD lainnya di bawah koordinasi BPBD

Perangkat

Kajian Risiko Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana

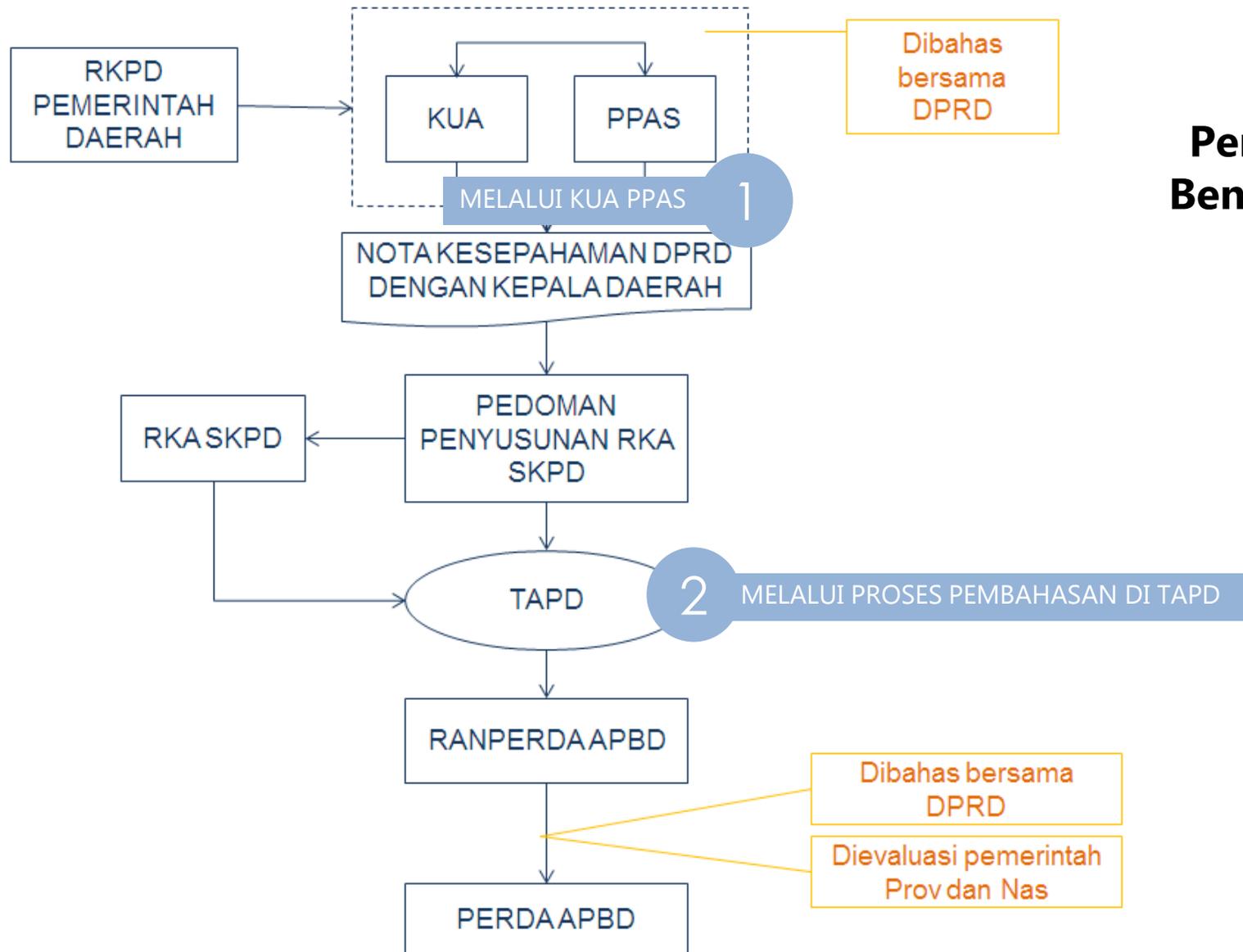
Pemetaan Aktor Kunci

Pintu Masuk

Pintu Masuk Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada Proses Perencanaan Pembangunan

Pintu Masuk Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada Proses Penganggaran Pembangunan

Pintu Masuk Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada Proses Penganggaran Pembangunan



1

Melalui KUA PPAS

JENIS DOKUMEN	PERANGKAT PENDUKUNG	TARGET KELUARAN	AKTOR KUNCI
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Ringkasan Kajian RIisiko Bencana Ringkasan Rencana Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan KUA memperhatikan potensi ancaman bencana dan estimasi dampak bencana dalam menyusun asumsi dasar RAPBD 	DPKAD, BPBD, Komisi DPRD Mitra BPBD, Banggar DPRD
Prioritas Plafon Anggaran Sementara		<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi prosentase anggaran yang signifikan untuk program pengurangan risiko bencana • Alokasi untuk dana siap pakai untuk penanggulangan bencana • Identifikasi program/kegiatan responsif PRB di semua SKPD, sesuai tupoksi masing-masing 	DPKAD, BPBD, Komisi DPRD Mitra BPBD, Banggar DPRD

2

Melalui Proses Pembahasan di TAPD

NO	TAHAPAN	OUTPUT	PENDEKATAN PENGINTEGRASIAN
1	Pembahasan KUA PPAS	Dokumen KUA PPAS	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan adanya pendanaan yang memadai untuk program PB baik mitigasi, kesiapsiagaan maupun tanggap darurat• Memastikan upaya PRB tidak dihilangkan dalam penganggaran
2	Penyusunan RKA SKPD	Dokumen RKA SKPD	
3	Penyusunan RAPBD	Dokumen RAPBD	
4	Pembahasan RAPBD di DPRD	APBD	

Kesimpulan

Kesimpulan

- Pengintegrasian merupakan bagian dari proses Pemaduan untuk memastikan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan di daerah
- Pengintegrasian difokuskan pada program-kegiatan yang pelaksanaannya menjadi ranah BPBD, baik dikerjakan secara teknis oleh BPBD sendiri maupun dikerjakan secara kolaboratif dengan institusi lainnya.
- Pengintegrasian membutuhkan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai perangkat bantu dalam mengawal isu pengurangan risiko bencana pada pintu masuk perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Prasyarat Optimalisasi Pengintegrasian PRB ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah



Prasyarat Optimalisasi Pengintegrasian PRB ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

- 1 **Komitmen** dari Kepala Daerah, Kepala SKPD dan DPRD
- 2 Unsur Pengarah BPBD yang **aktif melakukan koordinasi** dan secara berkala
- 3 Forum Pengurangan Risiko Bencana yang mampu **mengkolaborasikan kontribusi** lintas sector
- 4 **Kajian risiko bencana** yang mampu menjadi dasar teknokratis perencanaan kebijakan
- 5 **Rencana Penanggulangan Bencana** yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana

TERIMA KASIH